

**MENIM(B)ANG DISENSUS: POLITIK DAN ESTETIKA
SENO GUMIRA AJIDARMA DALAM CERPEN “SAKSI MATA”**
Considering Dissensus: Politics and Aesthetics of Seno Gumira Ajidarma
in “Saksi Mata” Short Story

Moch. Zainul Arifin^{a,*}

^{a,*}Prodi Ilmu Sastra, Pascasarjana, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosiohumaniora 1, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, Telepon (0274) 5035676,
Pos-el: mochzainul2018@mail.ugm.ac.id; arifin_zain90@yahoo.com

(Naskah Diterima Tanggal 3 Januari 2019—Direvisi Akhir Tanggal 4 Mei 2019—Disetujui Tanggal 6 Mei 2019)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan membahas upaya disensus dalam politik dan estetik Seno Gumira Ajidarma terhadap rezim representatif Komunitas Utan Kayu dan rezim etis Soeharto melalui cerpen “Saksi Mata”. Upaya disensus Seno yang ditampilkan melalui cerpen “Saksi Mata” dilihat dari migrasi kelas dan ideologi pengarang, kondisi sosial-politik, serta estetika narasi saat itu sehingga mampu menggoyahkan hierarki police dan keamanan rezim. Berangkat dari hal ini, bagaimanakah “Saksi Mata” menawarkan bentuk estetika melalui disensus terhadap struktur politik dan estetik, dengan migrasi pengarangnya guna mengguncang kekuasaan kedua rezim. Penelitian ini menggunakan teori disensus Jacques Rancière. Pengumpulan datanya dilakukan dengan metode simak dan dialektik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, “Saksi Mata” merespon struktur politik otoriter Orde Baru yang memobilisasi sensor, mengungkung kebebasan berpendapat dan berkarya. Kedua, pergerakan estetika Seno juga merongrong konvensi rezim etis dan rezim representatif. Dari sanalah disensus pergerakan Seno dengan “Saksi Mata”nya menawarkan estetika yang tidak terjebak pada imajinasi komunal.

Kata-Kata Kunci: disensus, migrasi, politik, estetik

Abstract: This study aims to discuss Seno Gumira Ajidarma's political and aesthetic disensus efforts towards the representative regime of the Utan Kayu Community and the Soeharto ethical regime through the short story “Saksi Mata”. Seno's census efforts were displayed through the short story “Saksi Mata” seen from class migration and author's ideology, socio-political conditions, and narrative aesthetics at the time so as to destabilize the police hierarchy and establishment of the regime. Departing from this, how “Saksi Mata” offers an aesthetic form through the census of political and aesthetic structures, with the migration of its authors to shake the power of both regimes. This research uses the census theory of Jacques Rancière. Data collection is done by referring and dialectically. The results showed that, first, “Saksi Mata” responded to the New Order's authoritarian political structure that mobilized censorship, confining the freedom of opinion and work. Second, Seno's aesthetic movement also undermines the conventions of ethical regimes and representative regimes. From there the census of the Seno movement with “Saksi Mata” which offered aesthetics that were not trapped in communal imagination.

Key Words: dissensus, migration, politics, aesthetics

How to Cite: Arifin, M.Z. (2019). Menim(b)ang Disensus: Politik dan Estetika Seno Gumira Ajidarma dalam Cerpen “Saksi Mata”. *Atavisme*, 22 (1), 47-60 (doi: 10.24257/atavisme.v22i1.525.47-60)

Permalink/DOI: <http://doi.org/10.24257/atavisme.v22i1.525.47-60>

PENDAHULUAN

Tragedi kemanusiaan Dili, Timor Timur, tahun 1991 yang menelan banyak korban jiwa cenderung tidak diberitakan oleh para jurnalis saat itu. Seno Gumira Ajidarma memberitakannya sehingga ia dipecat dari majalah *Jakarta Jakarta*. Kemudian, Seno mencoba cara lain untuk menyuarakan tragedi kemanusiaan tersebut, yaitu melalui cerpen “Saksi Mata” dan disusul terbitnya esai Seno berjudul “Kehidupan Sastra di dalam Pikiran” di dalam buku *Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara* (Ajidarma, 2005). Publik tidak mengetahui tragedi mengenaskan di Dili tersebut apabila tidak ada yang memberitakan. Dengan demikian terdapat distribusi sensibilitas dari rezim yang membuat masyarakat tidak peka terhadap tragedi kemanusiaan itu. Seno dengan memberitakan dan menulis cerpen “Saksi Mata” sebenarnya tengah membongkar kestabilan dan ketetapan sensibilitas yang dibentuk oleh rezim. Dengan melihat fakta tersebut, permasalahannya adalah bagaimana menerangkan politik dan estetika Seno Gumira Ajidarma dalam kondisi sosial-politik-budaya Orde Baru tersebut.

Permasalahan tersebut mendapat pendasaran dengan terdapatnya jarak sensibilitas tersendiri antara Seno dan rezim kekuasaan yang melingkupinya, baik rezim etis Soeharto maupun rezim Representatif Komunitas Utan Kayu. Rezim etis Soeharto dilihat sebagai segi politik dan juga perpanjangan tangan Manikebu karena sifatnya konservatif, sedangkan rezim representatif Komunitas Utan Kayu dan Teater Bengkel Rendra adalah perpanjangan tangan Lekra karena sifatnya kiri atau opisisi. Seno tampaknya berjarak dari sensibilitas kedua rezim tersebut. Manifestasi dari jarak sensibilitas tersebut adalah ketidaksetujuan terhadap tindakan rezim, bukan untuk kepentingan Seno pribadi melainkan untuk warga Dili yang disingkirkan. Term tersebut dalam politik demokrasi disebut disensus.

Disensus sebetulnya merupakan konfrontasi untuk menyuarakan yang tak dianggap, yakni penderitaan warga Dili, bukan antarkepentingan atau pendapat. Oleh karena itu bagi Jacques Rancière (May, 2008), esensi politik adalah disensus yang mengandaikan keadilan dan kesetaraan yang terus menerus diperjuangkan bukan yang telah ditetapkan.

Di samping itu disadari atau tidak, setiap karya sastra yang tercipta pada dasarnya dipengaruhi oleh ideologi yang menjadi latar belakang karya tersebut. Hal ini senada dengan Karl Marx bahwa sastra bersifat ideologis sekaligus berada dalam lingkaran ideologi (Eagleton, 1998). Dengan demikian, muara persoalannya ialah perjumpaan ideologi dalam relasi-relasi antara teks dan realitas. Akan tetapi, di dalam perjumpaan tersebut—pada level paling abstrak—memunculkan disensus yang berarti perbedaan antara akal dan selera pada hal yang sama. Dengan menerangkan adanya rezim etis dan rezim representatif berarti sebetulnya imajinasi dan sensibilitas masyarakat telah diatur dan dijebak dalam tatanan tertentu. Seno apabila bukan simpatisan dari keduanya berarti tengah berdisensus. Disensus politik ini bagi Rancière bukan berarti semacam diskusi antara publik yang membicarakan nilai dan kepentingan mereka, melainkan konflik antara siapa yang berbicara dan siapa yang tidak dapat berbicara, siapa yang ambil bagian dan siapa yang tidak ambil bagian (*part-of-no-part*). Ini perihal apa yang harus didengar sebagai ekspresi kesakitan dan apa yang harus didengar sebagai ide tentang keadilan. Dan hal ini bagi Jacques Rancière apa yang disebut sebagai ‘perang kelas’ bukanlah konflik antara kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang saling berlawanan, tetapi konflik tentang apa itu ‘kepentingan’ (Rancière, 1992). Apabila hanya perang kepentingan tentang suatu hal dan tidak merujuk pada hal yang substansial itu

disebut hanya sebagai ketidaksepakatan atau *Disagreement* (Rancière, 1999). Dari sana, Seno Gumira Ajidarma—sebagai pengarang—melalui cerpen “Saksi Mata” berupaya mengekspresikan suara-suara kesakitan pada insiden Dili, Timor Timur, yang dibungkam oleh rezim etis Soeharto. Untuk itu, tulisan ini bertujuan membahas masalah (1) struktur kelas yang dihidupi Seno sekaligus kritik terhadapnya, (2) bagaimanakah Seno menggoyahkan tatanan statis tersebut melalui migrasi kelas, dan (3) disensus politik yang dibawa Seno melalui cerpen “Saksi Mata”.

Cerpen “Saksi Mata” karya Seno ditulis dalam suasana politik yang spesifik, yakni berpijak pada tragedi Dili, Timor Timur 1991. Pada 10 Januari 2006, Presiden eks-Timor Timur, Xanana Gusmoa menyampaikan laporan Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste (CAVR) kepada Sekjen PBB. Dalam dokumen tersebut dikatakan bahwa militer Indonesia berusaha membasmi warga Timor Timur dengan meracuni makanan dan air, menggunakan *napalm* dan bahan kimia lainnya.

Dengan disampaikannya laporan CAVR tersebut tidak tertutup kemungkinan pelanggaran HAM yang telah berlangsung dan telah diadili di pengadilan Indonesia dapat ditinjau kembali, bisa jadi oleh PBB. Tindakan kekerasan itu dapat dilacak melalui karya sastra Seno Gumira Ajidarma, salah satunya cerpen “Saksi Mata”.

Padahal, seharusnya upaya pelacakan tersebut dapat dilakukan melalui sejumlah pemberitaan media. Akan tetapi, pada masa Orde Baru pers sebagai pilar keempat demokrasi dikekang untuk memberitakan hal-hal semacam itu. Tidak mudah bagi jurnalis untuk dapat meliput tragedi di Timor Timur. Dengan demikian, di samping upaya penyingkiran warganegara ‘bagian yang tak memiliki bagian’, juga akses pengetahuan kepada

seluruh masyarakat tidak terjadi. Dalam kondisi negara yang mengklaim sebagai negara demokratis, tindakan demikian sangat berten-tangan. Mereka yang tak dihitung, yakni warga Dili, telah memunculkan kondisi ketidaksetaraan. Praktik tersebut dilakukan oleh negara dengan memunculkan distribusi sensibilitas yang mengklarifikasi subjek atau masyarakat di dalam kategori dan normalisasi tertentu. Distribusi sensibilitas tersebut adalah sistem persepsi yang menyingkap suatu kesamaan sekaligus delimitasi bagian dan posisi di dalamnya (Rancière, 2004). Adanya pengklarifikasian dan penormalisasian dalam hal apapun bagi Rancière merupakan kondisi ketidaksetaraan.

Secara historis, normalisasi manusia berdasarkan kelas sosial tertentu telah ditetapkan oleh para elite, seperti filsuf dan negarawan. Fakta sosial, dalam hal ini meliputi kesadaran kelas, dibaca berdasarkan pada masing-masing kelompok kelas tertentu yang pada akhirnya ekspresi kesadaran manusia dapat ditentukan, dan harus ditentukan, berdasarkan kelas sosial yang mereka duduki. Akibatnya, mereka yang berada pada kelas bawah tidak diperkenankan mengurus urusan politik karena dianggap tidak memiliki kapasitas memadai untuk melakukannya. Pandangan hierarki semacam ini juga timbul dalam konteks kesusasteraan ketika pengarang harus, dan diharuskan, berasal dari kelas elite karena memiliki pikiran utuh atau *logos*, bukan hanya *phone*, tentang estetika. Tidak hanya sampai di situ, hierarki bentuk kesusasteraan yang paling baik, bermutu dan luhur juga ditentukan oleh rezim etis dan representasi yang berkuasa, akibatnya perbincangan soal ide dan kualitas menaja imajinasi telah diokupasi pada absolutisme pandangan satu pihak saja. Sebut saja ini sebagai totalitarianisme dalam soal estetika saat ekspresi-ekspresi estetika warga negara ditanggihkan demi politik konsensus, bukan disensus yang dapat

memunculkan ekspresi lain yang perlu dianggap. Mempersoalkan hal tersebut, pemi-kiran Jacques Rancière tentang disensus politik dan estetika dapat menjadi pisau bedah analisis kesusasteraan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini mengeksplorasi salah satu cerpen Seno Gumira Ajidarma yang berjudul “Saksi Mata” dalam upaya menyajikan bentuk ekspresi lain dan disensus politik di dalam unifikasi pandangan dominan.

Beberapa penelitian, sejauh yang diketahui, yang memiliki relevansi objek material dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Moch Zainul Arifin (2018) membahas “Saksi Mata” dari aspek materialistik Terry Eagleton untuk menemukan negosiasi struktur internal dan eksternal yang akhirnya melahirkan cerpen tersebut. Temuan dalam penelitian tersebut adalah semangat kritik Seno melalui karya sastra “Saksi Mata” dalam penjara totaliter Orde Baru masih bernegosiasi dengan ideologi dominan sehingga bentuk kritiknya masih lembek. Penelitian ini menerangkan pertarungan ideologi saja tetapi tidak pada bentuk pergerakan pengarang yang sebenarnya sangat mempengaruhi (Arifin, 2018).

Nurhadi mengkaji aspek kekerasan pelanggaran HAM di eks-Timor Timur dalam cerpen “Saksi Mata”, novel *Jazz Parfum* dan *Insiden* seperti pembunuhan, penyiksaan, penculikan, dan sejumlah kekerasan lain akibat daerah konflik (Nurhadi, 2016). Kelemahan dari penelitian Nurhadi ini hanya sekadar mendeskripsikan ulang apa yang terjadi di dunia nyata dan kemudian dikorelasikan dengan yang terdapat di cerpen. Demikian juga Hartono menelusuri hegemoni penguasa dalam cerpen “Saksi Mata” yang tercermin dari kesadaran bapak hakim yang mensubordinasi “Saksi Mata” secara tidak langsung (Hartono, 1999). Untuk masa sekarang penelitian dengan teori hegemoni seperti ini kurang relevan, sebab kondisi sosial-politik dulu masa

orde baru memang penuh dengan hegemoni sehingga tidak mengherankan ditaliti demikian. Namun, pada masa sekarang setelah reformasi di Indonesia konsep politik demokrasinya berganti, yakni salah satunya disensus.

Dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut tidak diterangkan bagaimana pergerakan politik dan estetika Seno melalui cerpen “Saksi Mata” yang dikungkung oleh rezim etis Soeharto dan rezim estetis Komunitas Utan Kayu. Hal tersebut penting sebab apabila dipahami Seno melalui sastra juga berperan menggoyahkan legitimasi kekuasaan, lalu bagaimana menjadi pergolakan politik dan estetikanya. Untuk itu, disensus diperlukan untuk menjawab soal tersebut. Dan sejauh ini tampaknya belum ada penelitian yang memakai objek formal disensus Jacques Rancière untuk meneliti karya sastra.

Dengan demikian, masala yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah kritik Seno terhadap struktur kelas yang termanifestasikan dalam cerpen “Saksi Mata”; (2) bagaimanakah pergerakan atau migrasi Seno dalam upaya menggoyahkan hierarki statis Orde Baru. Pergerakan migrasi tersebut adalah wujud dari disensus Seno: (3) bagaimana disensus politik dan estetik Seno untuk memperlihatkan corak kepenulisan yang diupayakan agar tidak terperangkap dalam imajinasi rezim etis dan rezim representasi melalui distribusi sensibilitas.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dibagi ke dalam dua objek kajian, yakni objek material cerpen “Saksi Mata” di dalam buku antologi cerpen karya Seno Gumira Ajidarma diterbitkan oleh Benteng tahun 2016. Objek formalnya adalah upaya disensus politik dan estetik pengarang, dalam hal ini Seno, di dalam kondisi sosial-politik otoriter Orde

Baru yang termanifestasikan melalui upaya penulisan cerpen “Saksi Mata”.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah cerpen berjudul “Saksi Mata” yang berada dalam buku antologi cerpen *Saksi Mata* karya Seno Gumira Adjidarma dengan sampul berwarna putih dan terdapat seorang terduduk tampak tersiksa di atas kursi. Cerpen yang berjumlah 10 halaman A5 terbit pertama kali di koran *Suara Pembaruan* tahun 1992.

Data penelitian terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini berupa kata, frasa, kalimat dan paragraf serta dialog antartokoh yang bersinggungan dengan masalah penelitian. Sementara itu, data sekunder penelitian ini diperoleh dari buku-buku, pengantar dari cerpen ini, artikel dan sebagainya yang dapat mempertajam dan memperkaya analisis tentang disensus politik dan estetika pengarang.

Metode pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini terbagi atas metode simak dan metode dialektik. Metode simak sebagaimana Faruk (2012: 168-169) jelaskan adalah menyimak satuan-satuan linguistik yang signifikan yang ada dalam teks karya sastra yang menjadi sumbernya atas dasar konsep-konsep teoretik yang digunakan. Data-data yang diperoleh dengan metode ini dapat ditambah, dikurangi atau bahkan dibuang sama sekali setelah dibandingkan yang paling relevan dengan konsep-konsep teoretik terkait, seperti berikut (1) Kritik terhadap struktur kelas yang pengarang dan tokoh hidupi baik dalam cerpen maupun di kondisi sosial-politik Orde Baru. (2) Untuk melihat upaya Seno dalam menghadapi hierarki statis itu, maka digunakan konsep migrasi kelas. Hal ini dapat memperlihatkan pergerakan dan transformasi ideologi, kelas, dan juga tekstual dalam diri pengarang. (3) Disensus politik dan estetika Seno ditelisik untuk memperlihatkan konteks kepenulisan cerpen

ini dan warna serta pandangan alternatif apa yang dibawakan.

Untuk mengkaji permasalahan ketiga, yakni disensus politik dan estetika, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dialektik. Metode ini (Faruk, 2012: 169) menyelaraskan bagian dengan keseluruhan, yakni konsep teoretik ke (1) dan ke (2), sampai terbentuk sebuah struktur dengan koherensi maksimal. Tidak hanya teks karya sastra yang menjadi sumber datanya yang diteliti, melainkan teks-teks filosofis ataupun kultural yang dianggap relevan dengan konsep-konsep teoretik sebelumnya. Dari sini proses penelitian ini diterangkan dengan prosedur yang selayaknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kritik terhadap Struktur Kelas: Archipolitik, Parapolitik, dan Metapolitik

Kondisi sosial-politik pengarang saat cerpen “Saksi Mata” ini ditulis sekaligus bentuk kritiknya terhadap struktur hierarki kelas perlu dijelaskan terlebih dahulu. Cerpen “Saksi Mata” ini ditulis pada tahun 1992, tepatnya setelah dipecatnya Seno oleh majalah *Jakarta Jakarta* pasca-membitakan insiden Dili Timor Timur 1991. Cerpen ini menampilkan tokoh “Saksi Mata” yang bersaksi di depan pengadilan dengan mata yang telah dicongkel sebelumnya. Tokoh ini tampaknya adalah manifestasi kondisi Seno sendiri sebagai jurnalis yang dipecat dengan analogi dicongkel matanya. Narasi cerpen ini penuh dengan bentuk-bentuk kritik secara politik terhadap rezim Orde Baru saat itu, yang menurut Rancière bentuk-bentuk kritik itu dapat dibagi menjadi kritik pada Archipolitik, Parapolitik dan Metapolitik (Rancière, 2003). Pembahasan pada subbab ini diawali dengan penjabaran bentuk-bentuk kritik Rancière yang dimanifestasikan Seno melalui cerpen “Saksi Mata”.

Untuk mengawalinya sedikit penjabaran filosofis kritik politik perlu diulas

terlebih dahulu. Filsafat politik yang berkembang dalam sejarah filsafat di barat menurut Rancière terbagi dalam tiga jenis, yakni 'Archipolitik', 'Parapolitik', dan 'Metapolitik' (Rancière & Corcoran, 2010: 31). Archipolitik adalah model filsafat Plato yang mana masyarakat dibagi-bagi dalam tatanan fungsional masing-masing. Pekerja, seniman, ksatria, dan penguasa diletakkan sendiri bahkan budak dan pekerja rendahan benar-benar dipinggirkan di luar filsafat. Dalam setiap tatanan tersebut, setiap orang memiliki kewajibannya masing-masing. Pekerja diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memakai tenaga, ksatria berperang, pemimpin berpikir. Prinsip keadilan yang Plato torehkan ialah didasarkan pada prinsip divisi-divisi bahwa adil adalah apabila setiap jabatan dalam divisi memiliki sifat-sifat yang cocok dan pas dengan jabatan itu. Pemimpin berpikir (bijak), ksatria berperang dan tukang hanya bekerja karena tidak ada waktu untuk hal lainnya.

Secara ringkas menurut Rancière, Plato hendak membentuk elitisme pengetahuan sekaligus politik dalam partisi-partisi dan hierarki sosial dengan nilai ideal masing-masing strata divisi. Bagi Rancière, sistem partisi ini mencerminkan ketidaksetaraan. Hanya mereka yang terlahir di kelas elit saja yang boleh berkuasa, sedangkan yang lain tidak.

Dalam cerpen "Saksi Mata", seorang hakim dinarasikan—yang tentu berada pada prisma Plato paling tinggi—harus kerepotan dengan seorang "Saksi Mata" yang dianiaya sehingga membuatnya berkata layaknya kelas rendah, seperti *Bego* berulang kali. Seno secara implisit telah memberi gambaran 'Archipolitik' Plato, yakni terdapat hierarki antara penguasa—dalam hal ini hakim—dan yang hanya rakyat biasa—yakni saksi mata yang merintih. Dengan demikian terdapat elitisme pengetahuan sekaligus hierarki sosial dalam masing-masing strata divisi,

yakni antara Hakim dan Saksi Mata yang notabene adalah orang biasa. Hal ini dapat dilihat dikutipan berikut.

"Dibikin *tengkleng*? Terlalu! Siapa yang bilang."

"Yang mengambil mata saya, Pak."

"Tentu saja, *Bego*! Maksud saya siapa yang mengambil mata Saudara pakai sendok?"

"Dia tidak bilang siapa namanya, pak."

"Saudara tidak tanya, *Bego*?"

"Tidak, Pak."

"Dengar baik-baik, *Bego*, maksud saya seperti apa rupa orang itu?"

(Ajidarma, 2016: 3-4)

Seno melalui narasi cerpen "Saksi Mata" ini tidak hanya menggambarkan 'Archipolitik Plato' tetapi juga mengkritiknya. Hal ini dapat dilihat seperti hakim yang seharusnya dihormati, disegani dan dihargai harus dipermalukan oleh tindakannya sendiri, seperti marah karena banyak hadirin di ruang sidang yang tertawa, menyebut ruang sidang bukan srimulat, dan palu sang hakim patah dan ditertawakan, difoto oleh wartawan, serta kejadian di mobil hakim yang ketiduran padahal sedang dalam perbincangan yang dimulainya sendiri. Berikut kutipan-kutipan yang membuktikan hal itu,

Orang-orang tertawa. Hakim mengetuk lagi dengan marah.

"Coba tenang sedikit! Ini ruang pengadilan, bukan Srimulat!"

(Ajidarma, 2016: 6)

Dengan sisa semangat, sekali lagi ia ketukkan palu, tetapi palu itu patah. Orang-orang tertawa. Para wartawan, yang terpaksa menulis berita kecil karena tidak kuasa menulis berita besar, cepat-cepat memotretnya. *Klik-klik-klik-klik!* Bapak hakim yang mulai diabadikan sedang memegang palu yang patah.

(Ajidarma, 2016: 9)

Seno juga menarasikan cerpen ini dengan memanifestasikan 'Para-politik'

Aristoteles. Seno tidak hanya memanifestasikan filsafat 'Para-politik' Aristoteles, tetapi juga secara implisit mengkritisnya. Seno meng-gambarkan ini pada narasi sang hakim yang berkali-kali menyebut "Saksi Mata" dengan sebutan '*Bego*' menunjukkan bahwa sang hakim menganggap bahwa dirinya memiliki *logos* (kepandaian) dan *phone*, sementara sang "Saksi Mata" hanya memiliki *phone* yang hanya menyuarakan rasa sakit dan senang saja. Di samping itu, Seno juga menarasikan kebodohan sang hakim dengan patahnya palu dan ketidakmengertiannya terhadap persoalan, sebagaimana kutipan berikut,

Hakim menggeleng-gelengkan kepala tidak bisa mengerti.
 "Absurd," gumamnya.
 Darah yang mengalir telah sampai ke jalan raya.
 (Ajidarma, 2016: 7)

Maka sebenarnya dalam filsafat Aristoteles, peminggiran dan instrumentalisasi kaum miskin dalam partisi dan hierarki terulang. Parapolitik Aristoteles membedakan antara *phone* dan *logos*. Bagi Rancière, pengklarifikasian manusia Aristoteles berdasarkan kemampuannya ini justru secara implisit mengandung niatan untuk mengingkari kesetaraan. Dari sinilah kritik Rancière terhadap Aristoteles yang menunjukkan adanya bias politik *by power* dalam kualifikasi manusia Aristoteles, sebagaimana yang terimplikasikan oleh Seno dalam cerpen "Saksi Mata" ini.

Lebih jauh lagi filsafat Marx juga menjadi bahan kritikan Seno secara halus yang senada dengan Rancière. Menurut Rancière, Metapolitik Marx berupaya untuk mencerabut dan mengisolasi kategori proletariat dari kelas pekerja aktual. Subjek proletariat Marx hanya sebagai abstraksi yang dikerahkan dalam upaya untuk masuk ke dalam politik revolusi, mengubah tatanan dominan secara total.

Perjuangan kelas Marx diupayakan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas di masa depan sebagai evakuasi politik. Kondisi ini menghasilkan kebebasan absolut. Tujuan tersebut ingin dicapai di masa mendatang. Artinya, kesetaraan tidak terjadi sekarang. Oleh karena itu, saat ini hingga waktu masa depan, entah kapan tepatnya waktu itu, tatanan sosial tetap didominasi oleh para pemilik properti. Dengan demikian, sampai tujuan akhir masyarakat tanpa kelas belum tercapai, maka posisi kelas pekerja tetap sebagai inferior daripada pemilik modal. Atau lebih mudahnya, Marx ingin menghilangkan ideologi, kelas-kelas dalam masyarakat karena ideologi dipahami sebagai *false consciousness*, 'kesadaran palsu'. Namun bagaimana mungkin manusia dapat hidup tanpa ideologi yang dikenal sebagai subjek (*sub* berarti di bawah, *jectus* berarti tunduk), artinya dari lahir telah berideologi, yakni berkontrak sosial pada negara sehingga subjek politiknya disebut warga negara. Perjuangan kelas untuk menghilangkan kelas atau menghilangkan ideologi, yang dianggap menipu, adalah juga ideologi semata. Dengan demikian, konfrontasi ideologi tanpa melihat situasi *real* kehidupan adalah bentuk dari keterjebakan akan harapan dari ideologi tertentu saja, bukan pada masalah substansial. Maka yang terjadi sebenarnya subjek mengerti betul bahwa dirinya terhegemoni secara ideologis tetapi tetap menganggap dirinya tidak mengetahui.

Di dalam cerpen "Saksi Mata" ini, Seno mengilustrasikan dengan kejadian pada saat sang "Saksi Mata" diminta memberikan kesaksiannya tentang kronologis peristiwa pencabutan mata sang "Saksi Mata". Dengan diandaikan bahwa orang selalu memberontak saat merasa disakiti, Seno justru menampilkan suasana baru yakni sang "Saksi Mata" tidak melawan sama sekali ketika matanya dicabut oleh gerombolan orang berseragam, berikut kutipannya.

"Ngomong-ngomong, kenapa Saudara diam saja ketika mata Saudara diambil pakai sendok?"

"Mereka berlima, Pak."

"Saudara, kan, bisa teriak-teriak atau melempar barang apa saja di dekat Saudara atau ngapain kek supaya tetangga mendengar dan menolong Saudara. Rumah Saudara, kan, di gang kumuh, orang berbisik di sebelah rumah saja *kedengeran*, tapi kenapa Saudara diam saja?"

"Habis, terjadinya dalam mimpi, sih, Pak."

(Ajidarma, 2016: 5-6)

"Jadi, terjadinya pasti di dalam mimpi, ya?"

"Saya, Pak."

"Tapi, waktu terbangun mata Saudara sudah tidak ada?"

Betul, Pak. Itu yang saya bingung. Kejadiannya di dalam mimpi, tapi waktu bangun, kok, ternyata betul-betul, ya?

(Ajidarma, 2016: 7)

Sang "Saksi Mata" tidak melawan karena kejadian pencabutan mata itu, secara sadar ataupun tidak, dikatakan terjadi di dalam mimpinya. Dengan menganalogikan mimpi sebagai ideologi yang harus diberangus dengan perjuangan kelas Marxis, Seno justru mengkritik itu dengan ilustrasi halus saat sang saksi yang justru sadar bahwa kejadian itu hanyalah mimpi (ideologi) saja, maka dia tidak melakukan perlawanan apa-apa. Akan tetapi akhirnya setelah bangun, sang "Saksi Mata" ternyata mengalami akibat pengambilan mata yang sebenarnya terjadi dalam mimpinya saja.

Ditambah lagi, Seno dalam "Saksi Mata" memperlihatkan bahwa dari tokoh sang hakim, yang dalam *police* adalah kelas elit plato, yang memiliki otoritas di ruang sidang untuk melihat persoalan nyata yang dialami oleh sang "Saksi Mata", malah berdebat soal pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya bertendensi pada kekuasaan. Dalam artian, sang hakim masih melindungi penguasa karena mengetahui

bahwa yang melakukan pencabutan mata berciri-ciri seragam, hitam, ninja dan berkelompok. Justru sebagai orang berpendidikan tinggi, sang hakim akan mengerti simbol-simbol dari ciri-ciri yang disebutkan oleh sang "Saksi Mata". Akan tetapi, hukum positif tidak mengenal adanya simbol-simbol seperti itu sebab yang diharuskan adalah bukti kuat tentang kejadian, denotasi makna dan bukan majas. Untuk itu, sebenarnya sang hakim sendiri walau sebagai penegak hukum masih terjebak dalam aturan-aturan hukum yang tentu didominasi ideologi penguasa. Padahal secara *real* bisa dilihat bahwa mata sang saksi telah raib, lenyap, tercerabut sampai akar-akarnya dari lubang matanya. Namun masih saja mengajukan pertanyaan soal-soal teknis, bukan yang etis. Hal itu dapat dilihat dari kutipan berikut.

"Seperti apa mereka?"

"Saya tidak sempat meneliti, Pak, habis mata saya keburu diambil, sih."

"Masih ingat pakaiannya barangkali?"

"Yang jelas mereka berseragam, Pak."

Ruang pengadilan jadi riuh kembali. Seperti dengungan seribu lebah.

Hakim mengetuk-ngetuk palunya. Suara lebah menghilang (Ajidarma, 2016: 4-5)

"Saudara "Saksi Mata"."

"Saya, Pak."

"Ngomong-ngomong, kenapa Saudara diam saja ketika mata Saudara diambil pakai sendok?"

"Mereka berlima, Pak."

"Saudara, kan, bisa teriak-teriak atau melempar barang apa saja di dekat Saudara atau ngapain kek supaya tetangga mendengar dan menolong Saudara. Rumah Saudara, kan, di gang kumuh, orang berbisik di sebelah rumah saja *kedengeran*, tapi kenapa Saudara diam saja?"

(Ajidarma, 2016: 6)

Meninjau ulang, membuat laporan, dan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sang hakim telah ketahui siapa dalang di balik kejadian

tercongkelnya mata sang “Saksi Mata” adalah analogi bentuk metapolitik yang menganggap keadilan dan kesetaraan dapat direngkuh dengan perjuangan kelas di masa depan dengan masih berada dalam jalur fasilitas ideologi tersebut. Secara etis, seharusnya dapat ditindak bahwa itu melanggar Hak Asasi Manusia, apalagi sang saksi yang juga menjadi korban telah melaporkannya pada pihak persidangan. Padahal dasar dari seluruh konstitusi adalah Hak Asasi Manusia. Akan tetapi mengapa adanya pelanggaran pada HAM tersebut masih dicarikan prosedur yang tepat dengan dalih sesuai konstitusi. Justru substansi konstitusi adalah melindungi hak warga negaranya. Perjuangan dengan delik aduan tersebut hanya tiba pada perdebatan di ruang sidang dengan tentu alasan ada prosedur teknis. Jadi sebetulnya, kritik yang hendak dilancarkan di sini adalah gagasan ideologis yang menyelimuti setiap pergerakan subjek di dalam ranah kehidupannya, justru mengakibatkan subjek berputar-putar pada persoalan metafisik tanpa melihat substansi persoalan.

Migrasi Kelas Seno

Seno memiliki cara tersendiri dalam menampilkan pikirannya. Meskipun dipecat sebagai Redaktur Pelaksana majalah *Jakarta Jakarta* karena memberitakan kesengsaraan dan kekerasan terhadap mereka yang tak ambil bagian, yakni warga Dili, Seno memiliki cara lain melalui karya sastra sebagaimana credo terkenalanya ‘Ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara’. Credo ini berasal dari esai Seno berjudul “Kehidupan Sastra di Dalam Pikiran” yang dipublikasikan oleh harian *Kompas*, Minggu, 3 Januari 1993. Berikut kutipan esai tersebut.

Ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Karena bila jurnalisme bicara dengan fakta, sastra bicara dengan kebenaran. Fakta-fakta bisa diembargo, dimanipulasi, atau ditutup dengan tinta

hitam, tapi kebenaran muncul dengan sendirinya, seperti kenyataan. Jurnalisme terikat oleh seribu satu kendala, dari bisnis sampai politi, untuk menghadirkan dirinya, namun kendala sastra hanyalah kejujurannya sendiri. Buku sastra bisa dibredel, tetapi kebenaran dan ke-susastraan menyatu bersama udara, tak tergugat dan tak tertahankan (Ajidarma, 2005: 325).

Ketidakputusasaan Seno yang berupaya menampilkan kebenaran ke dalam publik akhirnya diupayakan dengan menulis cerpen, salah satunya cerpen “Saksi Mata”. Di dalam kondisi politik yang didominasi total dengan penuh sensor oleh Soeharto, Seno tentu memiliki cara penulisan, pergerakan estetika dan pergerakan kelas yang sebetulnya radikal karena mampu menggoyahkan rezim. Pergerakan tersebut disebut migrasi yang mampu melakukan perlintasan kebudayaan. Di dalam upaya tersebut, pergerakan migrasi Seno perlu diulas untuk memberikan pengertian bahwa upaya mengembalikan ‘bagian yang tak ambil bagian’ (*part-of-no-part*) untuk menggoyahkan tembok hierarki tatanan Soeharto dan distribusi sensibilitasnya. Itulah gunanya interupsi dalam politik yakni gerak radikal migrasi Seno.

Hal pertama yang radikal dari Seno adalah migrasi tekstualnya. Harus diakui bahwa cerpen “Saksi Mata” ini melampaui zamannya saat kebanyakan roman percintaan, puitika religius serta estetika oposisi pemerintah yang terbuka, yakni Rendra dan Wiji Thukul dengan bahasa lugas, Seno tampil dengan satire dan analogi humor berkelas. Diksi-diksi yang dibawa juga sarat akan nuansa kritik terhadap penguasa, tetapi sangat halus, seperti ‘seragam’, “Saksi Mata”, dan ‘darah’ yang secara inheren menunjukkan kengerian insiden Dili yang melibatkan aparat negara itu dengan dibungkus bangunan dunia imajiner yang lain, seperti dalam kutipan berikut.

“Saksi Mata itu datang tanpa mata”

“Dari lubang pada bekas tempat kedua matanya mengucur darah yang begitu merah bagaikan tiada warna merah yang lebih merah dari merahnya darah yang mengucur perlahan-lahan dan terus-menerus dari lubang mata itu.”

(Ajidarma, 2016: 2)

“Masih ingat pakaiannya barangkali?”

“Yang jelas mereka berseragam, Pak.”

Ruang pengadilan jadi riuh kembali. Seperti dengungan seribu lebah.

(Ajidarma, 2016: 4)

Migrasi ideologis Seno juga dapat dilihat dari perpindahan Seno dari seorang Radaktur Pelaksana majalah *Jakarta Jakarta* yang kebanyakan hanya memberikan hal-hal yang sifatnya diinginkan oleh penguasa Orba saat itu. Dengan dalih demokrasi pancasila, doktrin pembangunan dan stabilitas politik, Soeharto memobilisasi dan membungkam suara jurnalisisme sehingga badan sensor negara melingkupi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun, Seno justru memberikan insiden tragis Dili Timor Timur 1991 di majalah *Jakarta Jakarta*. Ini menunjukkan migrasi Seno dari ideologi yang membeo Orde Baru menuju penyusara fakta lapangan sesungguhnya. Tidak sampai di situ, karena majalah *Jakarta Jakarta* terlalu ketakutan ketika Seno memberitakan kesaksiannya tentang insiden Dili, Seno akhirnya dipecat dari majalah tersebut. Tidak kehabisan akal, Seno akhirnya melukiskan kesaksiannya itu dalam bentuk cerpen “Saksi Mata” yang pertama kali dipublikasikan oleh harian *Suara Pembaruan* pada tahun 1992. Dari sini tampak pergolakan perpindahan Seno dari awalnya pengikut ideologi pro kekuasaan pindah ke jurnalisisme pengkritik kekuasaan hingga ke sastrawan yang mengkritik kekuasaan secara satire dan dibumbui humor.

Migrasi kelas lagi-lagi dilakukan oleh Seno, yang disebut migrasi subjek,

meskipun secara tidak langsung sebenarnya efek dari migrasi kelas pertama dan kedua. Bukan hanya karya—dalam hal ini cerpen “Saksi Mata”—dan ideologinya saja yang mengalami migrasi menerobos kelas dominan, tetapi juga sosok Seno itu sendiri. Seno (Fathurrohman, 2017) sebenarnya adalah putra seorang guru besar FMIPA UGM bernama Prof. Dr. Sastroamidjojo. Tidak seperti ayahnya, pada saat SMP Seno lebih suka kehidupan bebas. Seno awalnya tidak mau melanjutkan sekolah dan pada akhirnya mau bersekolah di SMA Kolese De Britto yang boleh tidak memakai seragam. Seno lebih bergumul dengan anak jalanan yang suka tawuran, pernah ikut teater juga. Kemudian Seno bekerja sebagai wartawan, menikah dan melanjutkan kuliah di jurusan Sinematografi di Institut Kesenian Jakarta. Sebagai wartawan, Seno juga berpindah-pindah dari media satu ke media lainnya hingga akhirnya berpindah menjadi ke sastrawan. Dengan demikian tidak heran mata wartawan dan mata-kesastrawannya berjaln-kelindan begitu kompleks dalam cerpen “Saksi Mata”.

Disensus: Politik dan Rezim Estetis

Dengan melihat pergerakan migrasi Seno tampak bahwa pengarang sebagai subjek politik tidak dapat begitu saja dibekukan dan ditertibkan dalam suatu tatanan tertentu. Memang tatanan yang telah ada tidak dapat begitu saja dihapuskan, namun terdapat cara lain yakni terus menerus mengungkap apa yang tidak ditampilkan atau sengaja disembunyikan oleh rezim, seperti derita warga Dili dan jurnalis yang dibungkam. Disensus adalah jalan yang mengkonfrontasi partisi sensibilitas yang diedarkan di masyarakat. Seno mencontohkan modus berpikir semacam ini saat ia bergerak dari tidak sekolah kemudian bersekolah dengan tidak memakai seragam, wartawan pro kekuasaan kemudian mendobraknya, narasi cerpen yang tampak realis dan realisme magis.

Adanya narasi jurnalis lain yang diharuskan mengikuti mobilisasi kekuasaan Soeharto, doktrin Pancasila, dan stabilitas politik yang mengekang, berakibat pada sebuah penembakan membabi buta di Dili Timor Timur yang menewaskan 273 orang. Penembakan yang dilakukan oleh tentara Indonesia yang terdiri atas pasukan A Brimob 5485, kompi A dan kompi D Batalion, serta kodim 1627 tidak disuarakan di publik. Persoalan tragis kemanusiaan tersebut apabila diwartakan akan mengguncang kekuasaan Orde Baru sehingga dibungkam suara-suara (*phone*) kesakitan itu. Ada mereka yang bagian tetapi tidak ambil bagian (*part-of-no-part*), yakni kepentingan, keadilan dan kemanusiaan masyarakat Dili, suara jurnanisme dan masyarakat sipil yang terninabobokan dengan doktrin-doktrin pembangunan dan stabilitas politik penguasa.

Senoewartakan insiden tragis itu dalam kapasitasnya sebagai jurnalis, tetapi akhirnya dia dicekal dan diberhentikan dari Redaktur Pelaksana majalah *Jakarta Jakarta*. Kemudian, Seno menyuarakan kengerian insiden Dili melalui cerpen, salah satunya cerpen “Saksi Mata”, sebagai upaya menghasilkan diskursus publik dan merongrong kesolekan, yang sebenarnya bobrok, dari kekuasaan. Dengan demikian, Seno tidak bertindak politik (sekaligus estetis) melalui “Saksi Mata” untuk sekadar menginginkan uang atau popularitas, justru dengan “Saksi Mata” ini Seno malah dipecat dari pekerjaannya dan terancam nyawanya. Hal ini dapat dilihat dari pengantar Seno dalam antologi cerpen “Saksi Mata” berikut.

Saya hanya bisa mengatakan, situasi ini sangat khas di masa Orde Baru. Kami, para pekerja pers masa itu, telah akrab dengan ketakutan. Sebagian bisa main-main dengan ketakutan, sebagian lagi memelihara ketakutan itu, juga setelah Orde Baru tumbang.

Wajah-wajah yang saya ingat sampai sekarang itu adalah wajah-wajah para

pencari keselamatan, dan hal itu tentu saja manusiawi. Namun, sampai seberapa jauh keselamatan yang satu boleh mengorbankan yang lain? Seberapa jauh pembantaian orang-orang tidak bersenjata boleh didiamkan, demi kepentingan apa pun dari sebuah lembaga manapun? Saya ingin mendengar sebuah jawaban. (Ajidarma, 2001: ix-x)

Sebuah gambaran kengerian yang mecekam di masa Orba yang tidak segan-segan memberangus mereka yang mengkritik dan beroposisi dengan pemerintah. Akan tetapi dengan dipecatnya dari wartawan, Seno menjadi masyarakat biasa yang *nganggur* sehingga justru berani menyuarakan oposisi, melawan dominasi penguasa, dan menceritakan kengerian insiden Dili dalam bungkus sastra cerpen “Saksi Mata”. Hal ini dapat dilihat dari lanjutan bagian pengantarnya di antologi cerpen “Saksi Mata” berikut.

Hari-hari itu saya memikirkan harga jiwa manusia. Saya menulis cerita dengan semangat perlawanan, antara lain, untuk melawan ketakutan saya sendiri—dan saya sungguh bersyukur telah mendapat pilihan untuk melakukannya. Penguasa datang dan pergi. Cerita saya masih ada. (Ajidarma, 2001: x)

Dengan semangat perlawanan, melawan ketakutan, dipecat dan nyawa terancam adalah konsekuensi yang Seno ambil untuk menyuarakan bukan kepentingan pribadi melainkan nilai keadilan. Sebagaimana bagi Rancière, disensus politik bukanlah sebuah diskusi antara orang-orang berbicara yang akan berhadapan dengan nilai dan kepentingan mereka (Bowman & Stamp, 2011). Ini merupakan konflik antara siapa yang berbicara dan siapa yang tidak dapat berbicara, perihal apa yang harus didengar sebagai ekspresi kesakitan dan apa yang harus didengar sebagai ide tentang keadilan. Ini yang dimaksud dengan “perang kelas”: bukan konflik antara kelompok-kelompok yang

mempunyai kepentingan ekonomi yang saling berlawanan, tapi konflik perihal apa itu “kepentingan”; perjuangan antara mereka yang menjadikan dirinya mampu mengatur kepentingan sosial dan kepentingan mereka sebenarnya yang hanya dapat mereproduksi kehidupannya. Untuk itu kesetaraan bukan pertama-tama dipasang sebagai tujuan dari politik, melainkan sekaligus aksioma dari yang politik. Kesetaraan tidak dipahami sebagai distribusi aritmetis dalam hak umum. Esensi kesetaraan tidak terdapat dalam persamaan dan kesatuan kepentingan, melainkan tindakan subjektivisasi untuk menantang, menunda, dan mematahkan tatanan sensibilitas yang dialamiahkan (Hadirman *et al.*, 2011). Tindakan subjektivitas yang mengubah koordinat partisi sehingga si subjek dapat mendeklarasikan bahwa kita semua setara, baik untuk kelas rendah, warga Dili, jurnalis yang dibungkam, bahkan hingga sampai mereka yang difabel. Suara mereka berhak mendapatkan tempat di ruang publik.

Rezim etis sebenarnya kelanjutan dari *arcipolitics* di wilayah estetika. Standarisasi estetika dinyatakan sebagai bentuk klasifikasi mana ‘sastra tinggi’ dan mana ‘sastra rendah’. Sementara itu, tolok ukur estetika itu sendiri telah mengalami banyak perdebatan. Kaum formalis Rusia, khususnya Slovisky, menyatakan bahwa *yang estetis* itu adalah upaya untuk membuat bahasa yang asing, tidak familiar, dan lepas dari bahasa keseharian lalu mengukuhkannya sebagai *second order of language* (Eagleton & Selden, 2005). Artinya bahasa sastra berupaya tidak memberikan sensasi dan imajinasi secara langsung seperti bahasa sehari-hari namun ditunda sejenak untuk dirasakan kedekatannya. Lyotard berbeda lagi tentang estetika. Menurutnya, estetika itu adalah upaya untuk membahasakan yang tak terbahasakan (*to speak the unspeakable*) (Lyotard, 1984). Ini didasari bahwa

selalu ada fenomena saat bahasa tak mampu mewakili realitas.

Rancière mengkritik rezim etis semacam ini yang dianggap memisahkan seni, dan juga estetika, dari ‘yang politis’. Etos ini, dalam beberapa hal, sangat kentara terlihat dalam rezim Manifesto Kebudayaan ketika berupaya mengembalikan seni ke wilayah seni, sastra untuk sastra. Apalagi Manikebu menyatakan ‘Pantjasila adalah falsafah kebudayaan kami’ yang sangat terkait dengan doktrin demokrasi Pancasila Orba. Melihat pergerakan Seno dari melawan denganewartakan insiden Dili pada majalah *Jakarta Jakarta*, kemudian menuliskan cerpen “Saksi Mata” di harian *Pembaruan*, tampak energi kritik Seno terhadap ketetapan sastra untuk sastra dengan mengandaikan perlunya melihat realitas yang sesungguhnya.

Dalam rezim representasi, Rancière tidak membedakan mana yang lebih unggul dari yang lain seperti yang dilakukan pemikir sebelumnya (Rancière, 2011) atau yang disebut puitika representasi (*la poétique de la représentation*). Estetika yang hierarki tersebut membentuk unsur ‘representasi’ sastra yang berkualitas, atau ‘representasi’ dari esensi sastra (estetika) itu sendiri. Yang problematik dari itu adalah sastra ditarik ke wilayah representasi, ke dalam wilayah kelompok atau komunitas tertentu. Akhirnya, setiap kelompok memiliki representasi sastranya sendiri. Misalnya, Lekra sampai komunitas Utan Kayu dan komunitas Bengkel Teater Rendra menyuarakan sastra yang tinggi haruslah sastra untuk rakyat.

Bagi Rancière, estetika—yang biasa disebutnya puitika estetik ‘*la poétique esthétique*’, yaitu puitika yang mengganti prisma fiksi yang hierarki ke dalam prisma bahasa yang egaliter. Yang terpenting bukan lagi materi yang diangkat—tidak berkenaan dengan itu, namun caraungkapnya, yakni apa saja secara setara dapat menjadi *yang estetis*. Estetika lalu dibangun bukan lagi atas esensi yang tetap,

melainkan atas ekspresinya, yakni model penulisannya, atau ekspresivitas kebahasaannya. Dengan demikian, yang terpenting bukan lagi *apa* yang dibicarakan oleh karya sastra, melainkan *bagaimana* karya itu dituliskan dan *bagaimana* subjek yang dibicarakan itu diekspresikan. Sekali lagi bagi Rancière, *yang estetis* sekaligus berada dalam tindakan politik dengan jalur ‘migrasi kelas’ sebagaimana politik dan subjek politiknya, gerakan politis ini juga melalui subjek dan karyanya.

Seno secara tidak langsung mengkritik hal tersebut melalui “Saksi Mata” yang ditunjukkan dengan ketidakterlibatannya pada rezim representasi tersebut, yakni Komunitas Utan Kayu dan Bengkel Teater Rendra, yang secara masif memiliki kualitas estetis sendiri yang lugas dalam mengkritik. Seno justru tiba pada ekspresi lain dari domain dan arahan implisit rezim tersebut dengan menampilkan bahasa satire dan humor berkelas dalam “Saksi Mata” sebagai upaya menyuarakan keadaan yang timpang. Pada akhirnya, stabilitas politik Orba tergoyahkan *distribution of the sensible* (distribusi sensibilitas) terhadap peristiwa Dili Timor Timur 1991. Di sinilah tujuan rezim estetis Seno diangkat dalam dialektika antara dua pergerakan poros ganda rezim etis dan rezim representasi. Dengan melakukan tiga kali migrasi kelas, yakni migrasi tekstual, migrasi ideologis, dan migrasi subjek, Seno tidak hanya mengkritik secara politis—Orde Baru—tetapi juga secara estetis—rezim etis dan rezim representasi.

SIMPULAN

Pada akhirnya apa yang dapat dikatakan dari pergolakan disensus Seno Gumira Ajidarma melalui cerpen “Saksi Mata” adalah persoalan bagaimana Seno mampu memanifestasikan dirinya dalam aksioma dan postulat kesetaraan, sebagaimana yang Jacques Rancière tawarkan untuk memulai filsafatnya. Segi pergerakan disensus Seno dapat dilihat

dalam dua aspek yakni politik dan estetis. Dominasi struktur dalam segi politik maupun estetis telah mengakibatkan tawaran-tawaran pikiran baru beserta kemungkinannya redup bahkan dihilangkan. Pertama, dari aspek politik tampak dari situasi otoriter Orde Baru memobilisasi sensor dan tengah membungkus identitas personal hanya dalam normalisasi penguasa, kalau tidak pro kekuasaan berarti kiri dan itu harus diberangus. Seno mampu menggoyahkan struktur tersebut melalui jalan migrasi kelas, yakni migrasi tekstual, migrasi ideologis, dan migrasi subjek. Dari mulai penulisan mengkritisi penguasa secara implisit, satire, dan humoris sampai pada perubahan profesi serta ideologi Seno yang awalnya bekerja di media penguasa kemudian menjadi independen.

Kedua, pergerakan estetika Seno juga merongrong konvensi estetis saat itu yang diwakili rezim etis, yakni Manikebu dan rezim representasi, Komunitas Utan Kayu dan Bengkel Teater Rendra. Seno mengambil sintesis dari dua garda estetika itu dengan jalan rezim estetis yakni melibatkan estetis dalam politik dengan menampilkan satire dan humor berkelas untuk melawan struktur kekuasaan dominan Orde Baru. Dari sana disensus pergerakan Seno untuk menampilkan pula suara *part-of-no-part*, bagian yang tidak ambil bagian, yakni mereka yang tertindas (korban Dili) kembali diperbincangkan ke dalam politik sehingga perbincangan soal itu dapat diambil alih oleh publik sendiri. Dengan demikian, cerpen “Saksi Mata” dapat dikatakan merupakan upaya Seno untuk berdisensus terhadap politik dan estetika rezim melalui jalur migrasi. Pada akhirnya, “Saksi Mata” membuat ekspresi di ruang publik tersentak dan imajinasi yang terperangkap oleh kungkungan rezim dapat terbebaskan dengan leluasa, tidak lagi terjebak dengan imajinasi rezim representatif maupun rezim etis kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajidarma, S. G. (2001). "Catatan Penulis: Ketakutan, Sepuluh Tahun Kemudian...". Dalam *Saksi Mata*, viii-x. Yogyakarta: Penerbit Bentang.
- Ajidarma, S. G. (2005). *Ketika Jurnalisme Dibungkam Sastra Harus Bicara*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Ajidarma, S. G. (2016). "Saksi Mata". Dalam *Saksi Mata*, 1-11. Yogyakarta: Penerbit Bentang.
- Arifin, M. Z. (2018). Ideologi (dan) Estetika Seno Gumira Ajidarma: Saksi Mata Dalam Ruang Perjumpaan Ideologis. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 15 (2), 227-242 (doi: [10.15575/al-tsaqafa.v15i2.3830](https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v15i2.3830))
- Bowman, P., & Stamp, R. (2011). *Reading Rancière: Critical Dissensus*. London & New York: Continuum.
- Eagleton, T. (1998). *Criticism and Ideology: A Study in Marxist Literary Theory*. New York: Verso.
- Eagleton, T., & Selden, R. (2005). A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory. *The Modern Language Review*, 5th ed., Vol. 81. (doi: [10.2307/3729614](https://doi.org/10.2307/3729614))
- Faruk. (2012). Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathurrohman, M. N. (2017). Profil Seno Gumira Ajidarma - Penulis Indonesia Biografi Tokoh Ternama. Diperoleh 4 Mei 2019 dari <https://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2017/06/profil-seno-gumira-ajidarma-penulis-indonesia.html>
- Hadirman, F. B., Robet, R., Wibowo, A. S., & Tjaya, T. H. (2011). *Empat Esai Etika Politik*. Jakarta: srimulyani.net dan Komunitas Salihara
- Hartono. (1999). Cerpen Saksi Mata Karya Seno Gumira Ajidarma Sebuah Analisis Dengan Teori Hegemoni. *Diksi*, 16 (6), 97-110 (doi: [10.21831/diksi.v16i6.7063](https://doi.org/10.21831/diksi.v16i6.7063))
- Lyotard, J.-F. (1984). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. In *Theory and History of Literature* (Vol. 10). United Kingdom: Manchester University Press.
- May, T. (2008). The Political Thought of Jacques Rancière. Edinburgh University Press. (doi: [10.5840/symposium200913112](https://doi.org/10.5840/symposium200913112))
- Nurhadi. (2016). Aspek Kekerasan Sebagai Refleksi dan Formatif Kondisi Sosial Politik di Eks-Timor Timur dalam Jazz Parfum & Insiden Karya Seno Gumira Ajidarma. *LITERA*, 7 (1), 13-31 (doi: [10.21831/ltr.v7i1.4877](https://doi.org/10.21831/ltr.v7i1.4877))
- Rancière, J. (1992). *On the Shores of The Politics*. London & New York: Verso.
- Rancière, J. (1999). Disagreement: Politics & Philosophy. University of Minnesota Press. (doi: [10.1111/j.1467-954X.2011.02009_2.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2011.02009_2.x))
- Rancière, J. (2003). The Philosopher and His Poor. Duke & London: Duke University Press.
- Rancière, J. (2004). *The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible*. New York: Continuum.
- Rancière, J. (2011). *Mute Speech: Literature, Critical Theory and Politics*. New York: Columbia University Press.
- Rancière, J., & Corcoran, S. (2010). *Dissensus on Politics and Aesthetics*. London & New York: Continuum.